



Dr. Junaidi, S.Ag., M.Hum., M.Kom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

KEBEBASAN dan kesetaraan serta merebaknya masyarakat sipil ternyata tidak selalu berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Masyarakat madani yang bertebaran di seantero negeri tampaknya bergerak tidak fokus pada visi, bahkan sebagian mempunyai ideologi anti demokrasi. Oleh sebab itu dikuatkan bahwa pesta demokrasi diancam anarki oleh

masyarakat anti madani. Nilai-nilai mulia religi dipelintir menjadi ujaran saling membenci sesama anak bangsa yang hakikatnya adalah saudara sendiri.

Pelajaran pentingnya, antara lain, adalah tentang manipulasi para elite politik yang mengobarkan propaganda untuk memenuhi hasrat kuasa, hanya menempatkan rakyat sebagai budak. Namun para budak tersebut semakin lama tidak dapat dikendalikan sehingga menghasilkan pemerintahan oleh gerombolan yang tidak mempunyai kompetensi memerintah alias 'mobokrasi'. Kemaruk kuasa selalu dapat memporakporandakan negara.

Mewujudkan cita-cita tatanan demokrasi di dalam masyarakat yang plural karena identitas primordial adalah sangat rumit. Jebakan demokrasi yang paling

mudah menjerat kedaulatan rakyat adalah dalil mulia dari demokrasi itu sendiri: kebebasan dan kesetaraan. Prinsip tersebut baru bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan umum bila disertai dengan sikap akan mengobarkan propaganda mengeluh rakyat agar mau membangun dukungan untuk kepentingan mereka sendiri.

Solusi harus dilakukan dalam jangka panjang dengan melakukan pendidikan hasrat manusia dalam mengelola gelora dan gerak jiwanya. Pendidikan hasrat akan menghasilkan manusia yang nuraninya terasah. Dengan demikian, pengelolaan negara secara gradual akan menjadi paralel dengan pengolaan jiwa yang memuliakan kekuasaan. Hadirnya negara yang bertanggung jawab, dan anarkis.

Kebebasan individual harus dipagari kepentingan umum melalui hukum dan lembaga-lembaga politik mampu mengelola partisipasi publik. Tanpa batas-batas yang jelas, para pemburu kekuasaan dengan sigap akan mengobarkan propaganda mengeluh rakyat agar mau membangun dukungan untuk kepentingan mereka sendiri.

Solusi harus dilakukan dalam jangka panjang dengan melakukan pendidikan hasrat manusia dalam mengelola gelora dan gerak jiwanya. Pendidikan hasrat akan menghasilkan manusia yang nuraninya terasah. Dengan demikian, pengelolaan negara secara gradual akan menjadi paralel dengan pengolaan jiwa yang memuliakan kekuasaan. Hadirnya negara yang bertanggung jawab, dan anarkis.

Kebebasan individual harus dipagari kepentingan umum melalui hukum dan lembaga-lembaga politik mampu mengelola partisipasi publik. Tanpa batas-batas yang jelas, para pemburu kekuasaan dengan sigap akan mengobarkan propaganda mengeluh rakyat agar mau membangun dukungan untuk kepentingan mereka sendiri.

Solusi harus dilakukan dalam jangka panjang dengan melakukan pendidikan hasrat manusia dalam mengelola gelora dan gerak jiwanya. Pendidikan hasrat akan menghasilkan manusia yang nuraninya terasah. Dengan demikian, pengelolaan negara secara gradual akan menjadi paralel dengan pengolaan jiwa yang memuliakan kekuasaan. Hadirnya negara yang bertanggung jawab, dan anarkis.

berakhirnya era Suharto, politik etnis secara kuat dididungkan dan menjadi ancaman, serta melahirkan kekerasan. Saya mengkaji dua hal yang mewarnai diskursus demokrasi di Indonesia, yaitu politik uang dan politik identitas.

Pertama, ada beberapa terminologi yang sering digunakan untuk term politik uang ini. Ada terminologi jual beli suara (vote-buying), klientelisme (clientelism), dan patronase. Dalam praktik, politik uang tidak beroperasi dengan pola tunggal, tetapi selalu melibatkan berbagai faktor yang menentukannya. Transaksi ini tidak semata ditentukan oleh politisi, tetapi juga didikte oleh pemilih. Pemilih akan didikte oleh kandidat bila posisi pemilih secara ekonomis dan kultural (kasta) lebih rendah atau mudah didominasi.



Kedua, politik identitas merupakan suatu perjuangan menuntut keadilan dan hak-hak sebagai manusia bagi orang-orang yang terpinggirkan. Asumsi L.A. Kauffman dari gerakan mahasiswa anti kekerasan (Student Nonviolent Coordinating Committee) memandang bahwa politik identitas merupakan politik gerakan sosial kontemporer abad ke-19 dan ke-20 hingga sekarang. Politik identitas merupakan ekspresi individual atau kolektif dalam kerangka hidup baik itu berkaitan dengan budaya, agama, seksualitas, bahkan sampai masuk pada gaya hidup. Jadi, politik identitas menyangkut seluruh kerangka hidup manusia. Semogal.

BUPATI GUNUNGKIDUL INGATKAN Tidak Boleh Ada Lahan Tidur di Pansela

WONOSARI (KR)- Bupati Gunungkidul H Sunaryanta mengingatkan para investor yang sudah membeli tanah di kawasan Pantai Selatan (Pansela) segera membangun sesuai dengan rencananya. Jika sebelumnya banyak pembelian tanah yang hanya menjadi komoditas jual beli, mulai sekarang semua investor wajib segera memulai pekerjaan. Sebab, jika tanah yang dibeli hanya menjadi lahan tidur tidak akan mempunyai mempunyai multi player efek terhadap masyarakat. "Alhamdulillah sekarang sudah banyak destinasi wisata baru, tahun ini diperkirakan akan bertambah banyak lagi," kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta dalam pertemuan dengan media dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jogle Kwarasan, Kapanewon Ngipar, kemarin.



KR-Endar Widodo

H Sunaryanta Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Sri Suhartanta SIP MSi juga memaparkan capaian pembangunan selama tahunh 2023, nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) naik dari 79,18 menjadi 79,39, kemiskinan turun dari 15,86 menjadi 15,60, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,96 menjadi 71,46. Sementara dalam rangka menegakkan disiplin PNS, pemerintah telah memberikan sanksi

15 pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Hukum disiplin dijatuhkan, dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penurunan kelas jabatan, maupun teguran lisan. Pegawai sebagai salah satu alat perekat bangsa merupakan hal yang harus senantiasa dijaga. Dalam kesehariannya, pegawai mesti menjadi suri tauladan dalam masyarakat berkekuasaannya diatur dengan PP 10/1983 jo PP 45/1990. Maka dari itu sejalan dengan ketentuan tersebut perlu adanya saluran herarki yang tertib demi mengoptimalkan fungsi PNS dalam kehidupan berkeuarga dan bermasyarakat. (Ewi)-f

DAMPAK KEMARAU PANJANG Meningkat, Kasus Kebakaran Hunian dan Lahan

WONOSARI (KR)- Kasus kebakaran terdampak kemarau panjang di Kabupaten Gunungkidul meningkat dibanding dengan kasus yang terjadi pada tahun lalu. Jumlah kasus kebakaran selama setahun berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai 131 kejadian. Dari jumlah tersebut khususnya untuk kebakaran hutan dan lahan mencapai 61 kasus. Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan kerugian akibat kebakaran selama tahun 2023 mencapai Rp 2,3 miliar. Kerugian mencapai Rp 2,3 miliar untuk kejadian kebakaran selama tahun 2023," katanya.

Penyebab terjadinya kebakaran beragam dari faktor kelalaian, akibat korsleting listrik maupun faktor lain. Untuk jenis kebakaran meliputi 8 jenis dan berdasarkan data meliputi kebakaran hutan/lahan yang disebabkan karena instalasi listrik, perapian, tungku dapur, tabung gas elpiji, rokok, lilin, dan kebakaran mobil. Dari sejumlah kasus yang terjadi untuk kebakaran lahan maupun hutan tercatat cukup tinggi akibat terjadi

kemarau panjang dan dampak El Nino tahun ini. Dari hasil pemetaan terdapat tiga kapanewon yang menjadi lokasi rawan kebakaran yaitu Playen, Wonosari, dan Ngawen. "Hal tersebut terjadi sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut," ujarnya.

Terpisah Kasubag Tata Usaha UPT Peadam Kebakaran Gunungkidul, Ngadiyono mengatakan angka kejadian kebakaran tahun 2023 memang melonjak dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai sekitar 50 kejadian. Terkait dengan meningkatnya kasus kebakaran pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebab kebakaran. Wilayah Gunungkidul sebagai daerah terluas di DIY. Sementara keberadaan Pos Damkar sampai saat ini baru ada dua yaitu di Kalurahan Siraman dan Karangmojo. Meski begitu, Pos Damkar Karangmojo baru akan diaktivasi pada bulan April 2024. "Terdapat dua Pos Damkar satu diantaranya masih dalam proses pengecekan. April mendatang diharapkan bisa diaktivasi," ujarnya. (Bmp)-f

Bajidoran Memiliki Kompleksitas Rebutan Kuasa



KR-Abrrar

Dr Asep Saepudin (samir kuning) didampingi istri dan panitia penguji Disertasi Ujian Tahap II terbuka.

YOGYA (KR) - Bajidoran selama ini dikenal sebagai seni hiburan yang menyajikan estetika tari dan karawitan Sunda. Namun di balik itu ternyata bajidoran memiliki kompleksitas rebutan kuasa dan dominasi maskulin di antara individu-individu yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Bajidoran (KPB).

Uniknya, rebutan kuasa dan dominasi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, mengapa arena bajidoran kental dengan praktik maskulinitas, serta mengapa mi-

tos dan idiologi maskulinitas dikonstruksi dan direproduksi oleh Namin Grup dan KPB.

Hal tersebut diungkapkan Asep Saepudin SSn MA dalam ujian Terbuka Tahap II untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Seni Program Doktor Pascasarjana ISI Yogyakarta di Gedung Concert Hall Pascasarjana ISI Jalan Suryodiningrat, Kemantren Mantriheron, Yogyakarta, Jumat (5/1).

Disertasi berjudul *Konstruksi Mitos Maskulinitas dalam Arena Bajidoran Namin Grup di Cicangor*

Muhammadiyah Perjuangkan Kalender Hijriah Global Tunggal

BANTUL (KR) - Muhammadiyah menghidupkan ijtihad dan tajdid supaya fungsi Islam dapat terus berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang terus berkembang.

"Akomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) oleh Muhammadiyah dilakukan untuk melaksanakan fungsi Islam. Ada banyak kriteria Kalender Islam Global, tetapi tidak semuanya bersifat Tunggal. Tunggal itu memiliki prinsip seluruh dunia mengikuti satu zona Tunggal, awal bulan baru dimulai serentak di seluruh dunia. Hal ini yang sedang diperjuangkan Muhammadiyah," kata Dr Hamim Ilyas MA, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah saat memberi pengantar Seminar Nasional Sosialisasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) di Gedung Fakultas Kedokteran (FK) UAD, Ringroad Selatan, Bantul, Jumat (5/1). Seminar diselenggarakan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah. Seminar berlangsung hingga Sabtu (6/1) tersebut juga diberi pengantar Parjiman MA (Warek Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah/AIK UAD) dan dibuka Prof Dr Syamsul Anwar MA (Ketua PP Muhammadiyah).

Menurut Hamim Ilyas, perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. "Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya penyatuan Kalender Hijriah berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian

dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan Kalender Hijriah tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

Dalam seminar hari pertama, Jumat menghadirkan narasumber Dr Hamim Ilyas MA (Ketua MTT - PP Muhammadiyah), H Rahmadi Wibowo Suwarno Lc MA MHUM, Dr Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar MA, Prof Toto Saksono PhD, Dr Maesyaroh MA, Dr Anisah Budiwati MSi, Prof Dr Syamsul Anwar MA, Dr Susiknan Azhari MA. Seminar membahas Dasar Organisasi Akomodasi KHGT, KHGT dalam



KR - Istimewa

Pembukaan Seminar Nasional Kalender Hijriah Global Tunggal di FK UAD.

MAYORITAS CERAI GUGAT Selama 2023, Tercatat 593 Pasutri Ajukan Cerai

WATES (KR) - Tercatat 593 pasangan suami istri (pasutri) mengajukan permohonan cerai sepanjang tahun 2023. Mayoritas yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Wates adalah pihak perempuan atau cerai gugat. "Total perkara cerai yang kami tangani sebanyak 587, plus enam 6 kasus tahun sebelumnya, sehingga ada 593 perkara," kata Panitera Muda Hukum PA Wates, Agus Wantoro, kemarin.

Dari total tersebut ungkapnya lebih dari separuh adalah cerai gugat dengan jumlah mencapai 454. Sedangkan perkara cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki atau disebut cerai talak sebanyak 139. Sesuai data PA Wates, setiap tahun jumlah cerai gugat cenderung lebih tinggi dibanding cerai talak. Misalnya 2020 jumlah cerai gugat mencapai 476 kasus dan cerai talak 151 kasus. Demikian juga pada 2021 jumlah cerai gugat mencapai 460 kasus dan cerai talaknya 164 kasus. Untuk tahun

2022 angka cerai gugat sebanyak 422 kasus dan cerai talak 133 kasus.

"Mayoritas pengajuan cerai dilatarbelakangi masalah ekonomi dan perbedaan prinsip antarpasangan serta adanya perselisihan," jelasnya.

Daam menangani kasus, pihak PA Wates tidak langsung memprosesnya tapi mengambil langkah mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI nomor 1/2016. "Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum," tulis website PA Wates.

Adapun proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi di-

lakukan dalam persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara. Dalam hal ini hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu mediator. Hakim juga menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan. Setelah kedua pihak sepatutnya mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.

Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi. Kalau mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Sebaliknya kalau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapan. (Rul)-f

PERAYAAN NATAL SMPN 5 YOGYA Undang Siswa SD Ikut Rasakan Sukacita

YOGYA (KR) - SMP Negeri 5 Yogyakarta menggelar acara perayaan Natal Pawitkra bertema 'Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi' di aula sekolah setempat, Sabtu (6/1). Perayaan Natal tahun ini terasa istimewa, karena selain diikuti oleh warga sekolah (guru, siswa dan orang tua siswa) beragama Kristiani (Kristen, Katolik) juga mengundang siswa Kristiani dari sekolah-sekolah dasar di sekitar SMPN 5 Yogya.

Kepala SMPN 5 Yogyakarta, Siti Arina Budiastuti MPd BI menuturkan, perayaan Natal Pawitkra rutin digelar setiap tahun. Sekolah memberikan keleluasan dan mengkonidisikan beribadah kepada seluruh peserta didik sesuai agamanya



KR-Istimewa

Sebagian siswa SD yang mengikuti dan menang lomba dalam rangka Natal Pawitkra.

masing masing. "Harapannya karakter terbaik anak terpupuk dengan baik dan berkarakter istimewa," katanya.

Turut hadir Pengawas Pendidikan Agama Kristen dari Kemenag Kota Yogyakarta, Purwadi STH MPd dan mantan guru Pendidikan Agama Kristen SMPN

5 Yogya.

Arina memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua yang terlibat sehingga perayaan Natal Pawitkra berjalan meriah. Ia juga mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba perayaan Natal yang diikuti 12 SD di sekitar sekolah. Lombanya yaitu menyanyi

lagu Natal dan story telling. "Juara 1 lomba tampil di perayaan Natal ini," ujarnya.

Waka Bidang Sarana dan Prasarana SMPN 5 Yogya, Aryani Artha Kristanti menambahkan, siswa Kristiani SD sengaja diundang dalam rangka merayakan harmoni dan sukacita Natal yang ada di SMPN 5 Yogya. Menurutnya, SMPN 5 Yogya merangkul dan melayani semua siswa dengan beragam latar belakang, agama, suku, ras.

"Perayaan Natal ini bertujuan meningkatkan iman siswa Kristiani termasuk guru dan orang tua siswa. Selain itu memperkuat persaudaraan dan kerukunan seluruh warga sekolah," katanya. (Dev)-f